

KEBIJAKAN MARITIM INDONESIA DALAM MENUNJANG SISTEM KEAMANAN TRANSPORTASI LAUT

Ansyari Mosyofa dan Naufal Muammar

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: ansyarimosyofa25@gmail.com

Abstrak

Kebijakan Maritim Indonesia dalam Menunjang Sistem Keamanan Transportasi Laut telah menjadi fokus utama dalam beberapa tahun terakhir. Dukungan kuat dari pemerintah, regulasi maritim yang ketat, kerja sama regional, dan investasi dalam infrastruktur maritim telah memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan dan kelancaran transportasi laut di negara kepulauan ini. Infrastruktur maritim, seperti pelabuhan modern, jaringan pelayaran, dan fasilitas pendukung, bukan hanya mendorong ekonomi dengan memfasilitasi perdagangan dan konektivitas antar pulau, tetapi juga mendukung sektor pariwisata yang berkembang. Upaya implementasi kebijakan maritim melibatkan regulasi ketat, kerjasama antarnegara, pengembangan kapabilitas keamanan maritim, promosi transportasi laut ramah lingkungan, serta peningkatan keamanan kapal dan pelabuhan. Semua ini bertujuan untuk menjaga stabilitas perdagangan global, meningkatkan perekonomian, dan memastikan keamanan transportasi laut di perairan Indonesia. Dengan adopsi Doktrin Maritim Indonesia pada tahun 2015 dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Indonesia semakin menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan dan keselamatan transportasi laut sebagai bagian integral dari wawasan nasional dan keamanan Republik Indonesia sebagai negara maritim.

Kata Kunci: Keselamatan, Keamanan, Maritim, Transportasi Laut, dan Pelayaran

Abstract

Indonesian Maritime Policy in Supporting the Maritime Transportation Security System has become a main focus in recent years. Strong support from the government, strict maritime regulations, regional cooperation, and investment in maritime infrastructure have played a key role in maintaining the security and smoothness of maritime transportation in this island nation. Maritime infrastructure, such as modern ports, shipping networks, and supporting facilities, not only drives the economy by facilitating trade and connectivity between islands but also supports a growing tourism sector. Efforts to implement maritime policy involve strict regulations, cooperation between countries, developing maritime security capabilities, promoting environmentally friendly maritime transportation, as well as increasing ship and port security. All of this aims to maintain global trade stability, improve the economy, and ensure the safety of maritime transportation in Indonesian waters. With the adoption of the Indonesian Maritime Doctrine in 2015 and the Republic of Indonesia Law No. 17 of 2008 concerning Shipping, Indonesia increasingly emphasizes its commitment to maintaining the security and safety of maritime transportation as an integral part of the national outlook and security of the Republic of Indonesia as a maritime country.

Keywords: Safety, Security, Maritime, Sea Transport, and Shipping

PENDAHULUAN

Sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia. Sejak lama, telah menjadi jalur utama transportasi global yang sibuk dengan berbagai model transportasi yang menghubungkan benua-benua. Selain itu, Indonesia berfungsi sebagai alur penghubung antara seluruh kota dan juga pulau-pulau yang ada serta memiliki banyak kekayaan yang bisa menjadi harapan dan kesejahteraan untuk seluruh rakyatnya. Maka dari itu, sangat penting untuk mengatur dan mengelola dengan profesionalisme sistem transportasi ini demi kepentingan bangsa dan negara, terutama dari pertahanan, keselamatan, dan keamanan transportasi barang, penumpang, dan hewan-hewan di wilayah Indonesia.

Gangguan atau ancaman terhadap keamanan dan keselamatan transportasi di wilayah Indonesia dan sekitarnya dapat mengakibatkan kerugian dalam penghasilan negara, terutama dari sektor transportasi, karena keselamatan dan keamanan transportasi sangat berpengaruh pada pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal ini, Indonesia harus memastikan keamanan dan keselamatan transportasi, sangat baik untuk di tingkat nasional maupun internasional. Seiring dengan pengalaman buruk dari beberapa kecelakaan transportasi dalam beberapa tahun terakhir yang telah menimbulkan kerugian manusia dan harta benda, perlu ditinjau kembali bagaimana pelaksanaan kebijakan dan sistem penanganan keamanan dan keselamatan transportasi laut yang ada di Indonesia.

Saat ini, semua negara harus mematuhi berbagai perjanjian internasional mencakup keselamatan dan keamanan transportasi, yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, Indonesia dianggap belum



sepenuhnya mematuhi moto ini, terutama dalam hal menangani masalah keselamatan dan keamanan transportasi yang semakin meningkat. Hal ini juga berkaitan dengan pelaksanaan hukum transportasi di Indonesia yang belum memadai dan masih membingungkan. Di sisi lain, Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dalam paradigma kepemimpinan dan pemerintahan, termasuk lebihnya aspek demokratisasi, tuntutan good governance, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Salah satu perubahan utama adalah desentralisasi pemerintahan daerah, yang memungkinkan daerah untuk mengatur

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode literasi dimana penelitian ini mengambil data dari jurnal dan buku resmi yang sudah ada sebelumnya. Dimana kami melakukan pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, yang ada hubungannya dengan kebijakan maritim terhadap keamanan transportasi laut dengan mengacu pada undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Transportasi Laut

Isu keselamatan dan keamanan dalam bidang transportasi telah menjadi topik pembahasan yang sering dibicarakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat, terutama dalam beberapa tahun terakhir ketika kecelakaan transportasi sering terjadi. Di Indonesia, sistem keselamatan dan keamanan dalam transportasi laut belum berjalan optimal, yang berpotensi berdampak pada kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sangat strategis. Untuk mengatasi masalah ini, Departemen Perhubungan mengeluarkan kebijakan pada Maret 2007 yang dikenal sebagai metode roadmap, dengan tujuan meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi laut serta aspek lainnya, seperti perkembangan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia. Meskipun data menunjukkan penurunan rata-rata kecelakaan sebesar 6,95% per tahun sejak tahun 2011, jumlah korban jiwa meningkat sebesar 46,71% per tahun. Penting untuk diingat bahwa transportasi laut, termasuk pelayaran, memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008. Keamanan dan keselamatan ini menjadi faktor strategis dalam wawasan nasional dan keamanan Republik Indonesia sebagai negara maritim. Kebijakan Maritim Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan, termasuk Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menekankan pentingnya menjaga keamanan dalam transportasi laut. Selain itu, Indonesia telah mengadopsi Doktrin Maritim Indonesia pada tahun 2015 sebagai langkah penting dalam upaya meningkatkan sektor maritim negara ini. Doktrin ini mencakup strategi keseluruhan yang melibatkan Angkatan Laut, kepolisian, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan keamanan di perairan Indonesia. Doktrin ini menekankan pentingnya kerja sama regional dan internasional dalam menjaga keamanan transportasi laut.



a). Tabrakan Kapal

b). Kapal Tenggelam

Gambar 1. Kecelakaan Kapal

Kebijakan Maritim Indonesia memiliki beberapa peran penting dalam menjaga keamanan transportasi laut. Penyediaan Infrastruktur Investasi dalam infrastruktur pelabuhan dan fasilitas maritim adalah bagian integral dari kebijakan ini. Pelabuhan modern dan fasilitas yang memadai membantu memastikan kelancaran operasi transportasi laut. Pengawasan dan Patroli Keberadaan Angkatan Laut dan Kepolisian Laut Indonesia memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap perairan Indonesia. Patroli rutin dan pengawasan meningkatkan deteksi terhadap potensi ancaman keamanan. Kerja Sama Regional: Kebijakan Maritim Indonesia mendukung kerja sama regional dengan

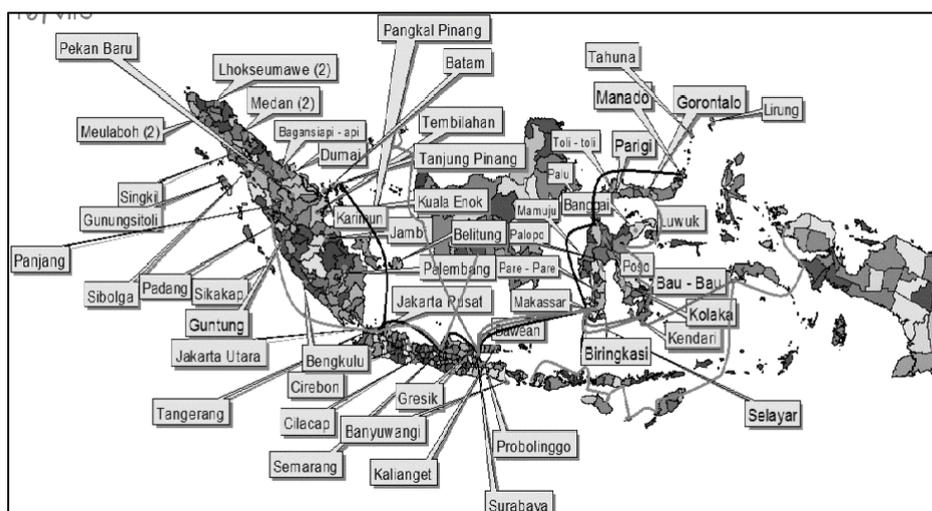
negara-negara tetangga dan lembaga internasional seperti IMO (International Maritime Organization). Hal ini membantu dalam pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan koordinasi dalam menghadapi ancaman maritim. Pengembangan Kapasitas Kebijakan Maritim Indonesia juga melibatkan pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam menghadapi ancaman keamanan transportasi laut. Ini termasuk pelatihan untuk personal yang terlibat dalam operasi maritim. Keselamatan dan keamanan maritim di sini adalah prioritas utama yang harus diberikan pada sektor pelayaran dalam mendukung kelancaran transportasi laut di Indonesia, sebuah negara kepulauan. Indonesia memiliki kedaulatan atas seluruh perairan Indonesia, dan laut memiliki peran yang sangat penting sebagai sarana penyatuan bangsa dan wilayah Republik Indonesia. Laut juga merupakan aset berharga bagi bangsa ini, serta bagi masa depan Indonesia. Oleh karena itu, penguasaan atas perairan ini berarti bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugas pemerintahan terutama dalam penegakan hukum di laut, baik untuk mengatasi ancaman pelanggaran, mengatur pemanfaatan perairan, serta menjaga dan meningkatkan keselamatan pelayaran dengan efisien. Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 yang mengesahkan status Indonesia sebagai Negara Kepulauan menurut konvensi PBB, pengakuan ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan telah diakui oleh dunia internasional. Kebijakan Pemerintah selama hampir lima dekade terakhir, yang tidak memiliki sebuah Kementerian yang secara khusus bertanggung jawab atas urusan kemaritiman, ternyata merupakan kesalahan serius dalam struktur pemerintahan sebuah negara yang memiliki wilayah laut seluas sekitar 3.257.483 km², atau setara dengan tiga perempat dari total wilayah daratan. Hal ini seharusnya menjadi sebuah tantangan yang bisa diatasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, dan bisa membantu memperbaiki pandangan yang keliru tentang isu kemaritiman ini.

Infrasturuktur Maritim Indonesia

Infrastruktur maritim adalah salah satu elemen kunci dalam mengoptimalkan potensi ini. Artikel ini akan membahas peran penting infrastruktur maritim Indonesia dalam transportasi laut, dengan fokus pada peran, perkembangan, dan dampaknya. Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek infrastruktur maritim, termasuk pelabuhan, jaringan pelayaran, dan fasilitas pendukung lainnya.

Peran Infrastruktur Maritim dalam Transportasi Laut Penggerak Ekonomi, Dukungan Logistik, Pengembangan Pariwisata dan Konektivitas Antar Pulau Infrastruktur maritim yang baik memainkan peran kunci dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta dan Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya merupakan pintu gerbang bagi ekspor dan impor barang. Mereka juga memberikan lapangan kerja dan kontribusi signifikan terhadap PDB negara. Dukungan Logistik Infrastruktur maritim yang canggih membantu mengoptimalkan rantai pasokan dan distribusi. Kapal-kapal kontainer modern, dermaga, dan fasilitas bongkar muat memungkinkan barang-barang untuk diangkut dengan lebih efisien, yang pada gilirannya mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di pasar internasional. Pengembangan Pariwisata Indonesia adalah negara dengan potensi pariwisata yang luar biasa. Infrastruktur maritim mendukung pengembangan pariwisata bahari, seperti kapal pesiar, pulau wisata, dan fasilitas rekreasi di pesisir. Ini menciptakan lapangan kerja tambahan dan pendapatan dari sektor pariwisata. Konektivitas Antar Pulau Sebagai negara kepulauan, konektivitas antar pulau adalah kunci. Infrastruktur maritim, termasuk pelabuhan, feri, dan kapal penumpang, membantu menghubungkan berbagai pulau dan memudahkan mobilitas penduduk serta perdagangan antar pulau.

Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan infrastruktur maritim yang lebih maju. Dengan sumber daya laut yang melimpah, negara ini dapat menjadi pemain utama dalam ekonomi biru global. Melalui investasi yang bijaksana, pengembangan infrastruktur maritim dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan memastikan keamanan maritim di wilayah ini.



Gambar 2. Peta Pelabuhan Indonesia

Perkembangan Infrastruktur Maritim Infrastruktur maritim Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa proyek infrastruktur penting yang telah berkontribusi pada peran positifnya dalam transportasi laut meliputi Program Revitalisasi Pelabuhan: Pemerintah Indonesia telah menginisiasi program revitalisasi pelabuhan, yang termasuk perluasan dan modernisasi pelabuhan utama seperti Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Tanjung Perak. Peningkatan Armada Kapal: Investasi dalam armada kapal barang dan penumpang yang lebih besar, lebih efisien, dan ramah lingkungan telah meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mengelola angkutan laut. Pembangunan Fasilitas Pendukung: Fasilitas pendukung seperti dermaga, area pergudangan, dan sarana bongkar muat modern telah dibangun untuk mendukung kelancaran operasi pelabuhan.

Pengembangan Transportasi Laut

Keamanan transportasi laut adalah elemen kunci dalam menjaga stabilitas perdagangan global dan mobilitas manusia. Transportasi laut memegang peran penting dalam perekonomian global, memfasilitasi perdagangan internasional dan konektivitas antarbangsa. Indonesia berada pada posisi strategis dalam jalur perdagangan dunia, mengingat bahwa 90% perdagangan internasional dilakukan melalui jalur laut, dan sekitar 40% dari jalur tersebut melewati perairan Indonesia. Dalam konteks pertumbuhan perdagangan laut yang terus meningkat, keamanan transportasi laut menjadi prioritas utama. Meskipun demikian, layanan transportasi laut domestik saat ini masih terpusat di wilayah dengan aktivitas ekonomi tinggi, terutama di wilayah barat Indonesia. Karakteristik kepulauan di wilayah timur Indonesia membatasi perkembangan sektor maritim nasional yang masih terbatas. Untuk mencapai status negara maritim yang kuat, Indonesia harus mampu memanfaatkan potensi wilayah laut sebagai basis untuk mengembangkan kekuatan ekonomi, pertahanan, keamanan, bahkan geopolitik. Oleh karena itu, diperlukan upaya dan implementasi kebijakan maritim dalam pengembangan keamanan dan keselamatan transportasi laut, serta pengembangan wilayah pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia. Hal ini harus didukung dengan layanan transportasi laut yang mampu menghubungkan wilayah barat dan timur Indonesia, berperan sebagai aktivitas distribusi logistik. Dengan demikian, akan memungkinkan penurunan biaya logistik yang dapat mempercepat pemerataan perekonomian di seluruh wilayah Indonesia.



Gambar 3. Penangkapan Kapal Asing di Laut Indonesia

Adapun Upaya dan implementasi Pengembangan Keamanan Transportasi Laut melalui Kebijakan Maritim Yaitu Regulasi Maritim Pembuatan kebijakan maritim yang efektif dimulai dengan peraturan maritim yang ketat. Organisasi internasional seperti International Maritime Organization (IMO) telah mengembangkan konvensi dan kode internasional, termasuk Konvensi SOLAS (International Convention for the Safety of Life at Sea) dan MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships), untuk mengatur keselamatan kapal dan lingkungan laut. Kerjasama Antarnegara Pengembangan kebijakan maritim melibatkan kerjasama aktif antara negara-negara. Organisasi regional dan perjanjian bilateral memainkan peran penting dalam mendukung upaya bersama untuk keamanan transportasi laut di kawasan-kawasan tertentu. Kapabilitas Keamanan Maritim Upaya dalam mengembangkan kapabilitas keamanan maritim mencakup investasi dalam teknologi yang dapat digunakan untuk pemantauan perairan, pertahanan, dan penegakan hukum di laut. Promosi Transportasi Laut Ramah Lingkungan Dalam upaya mengurangi dampak lingkungan, negara-negara sedang berusaha untuk mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dalam transportasi laut, seperti kapal yang lebih efisien secara energi dan bahan bakar alternatif. Keamanan Kapal Implementasi kebijakan maritim kuat melibatkan pemeriksaan dan pengamanan kapal. Ini mencakup pemantauan keamanan fisik kapal, sistem komunikasi yang aman, dan perlengkapan keamanan seperti airak berkecepatan tinggi untuk melawan ancaman perompakan. Keamanan Pelabuhan Kebijakan maritim juga mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan pelabuhan. Ini termasuk pemeriksaan ketat kargo, pengawasan lalu lintas kapal, dan penguatan infrastruktur pelabuhan.

Tabel 1. Regulasi Maritim dalam lingkup pelayaran

No	Peraturan	Pembahasan	Respon
1	Undang-Undang No.17/1985 pasal 1	Pengesahan Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	Terlaksana
2	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 (UU/2008/17)	Pelayaran	Belum Terlaksana

KESIMPULAN

Keselamatan dan keamanan transportasi laut menjadi perhatian penting di Indonesia. Kebijakan Maritim Indonesia, yang mencakup undang-undang, doktrin, dan kerja sama regional, berperan dalam mengamankan perairan. Ini melibatkan investasi dalam infrastruktur, pengawasan, kerja sama regional, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Infrastruktur maritim Indonesia memegang peran kunci dalam mendukung ekonomi, logistik, pariwisata, dan konektivitas antar pulau. Perkembangan infrastruktur ini mencakup revitalisasi pelabuhan, peningkatan armada kapal, dan pembangunan fasilitas pendukung, yang semuanya mendukung efisiensi dan pertumbuhan dalam transportasi laut. Transportasi laut memainkan peran vital dalam perdagangan global, dan Indonesia memiliki potensi besar dalam hal ini. Namun, untuk mengoptimalkan potensi maritimnya, Indonesia perlu memprioritaskan keamanan transportasi laut dan mengembangkan wilayah timur Indonesia. Kebijakan maritim harus mendukung pengembangan ekonomi, geopolitik, pertahanan, dan keamanan, serta memastikan pelayanan transportasi laut yang efisien. Upaya untuk meningkatkan keamanan transportasi laut melibatkan regulasi maritim yang ketat, kerjasama antarnegara, pengembangan kapabilitas keamanan maritim, promosi transportasi laut ramah lingkungan, keamanan kapal, dan keamanan pelabuhan. Semua ini bertujuan untuk memitigasi risiko dan ancaman yang terkait dengan transportasi laut serta untuk menjaga perdagangan internasional yang aman dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- [2] Indonesia Maritime Doctrine, 2015.
- [3] Peraturan Menteri Perhubungan No. 45 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim.
- [4] International Maritime Organization (IMO), "Indonesia - Maritime Security."
- [5] Buku: Haryadi, C. P., & Rochardjo, H. S. Maritime Security in Indonesia: Regional and Global Gaspersz, V. (2019). Evaluasi kinerja pelabuhan pada perusahaan pelabuhan di Indonesia. Mitra Wacana Media, (2019).
- [6] Djamil, T. Development of the Indonesian Shipping Industry: Past, Present, and Future. Indonesian Journal of Shipping and Logistics, 1(1), 15-25, (2018).
- [7] Ministry of Transportation, Republic of Indonesia. Indonesia's Maritime Connectivity: Progress and Challenges. Retrieved from <https://hubla.dephub.go.id/overview>, (2020).
- [8] International Maritime Organization (IMO). International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), (2021).
- [9] International Maritime Organization (IMO). International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL), (2021).
- [9] United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Modernization of Ports and Development of Maritime Transport, (2021).
- [10] International Chamber of Shipping (ICS). Shipping and World Trade, (2021).
- [11] United States Coast Guard. (Code for Unplanned Encounters at Sea (CUES), 2021).